

# Peta Masalah dan Alternatif Solusi

## Kasus Akuisisi Sukhoi

\*\*

**Andi Widjajanto**

Debat yang terjadi di ruang publik tentang kasus akuisisi Sukhoi pada dasarnya mempertanyakan dua masalah utama: kebutuhan pertahanan dan prosedur/mechanisme anggaran. Debat publik tentang kebutuhan pertahanan berkisar pada 3 isu: (1) adaptasi sistem persenjataan TNI-AU ke sistem Rusia; (2) kehandalan teknologi dan kesinambungan dukungan sistem persenjataan Rusia; dan (3) kejelasan tentang rencana strategis Departemen Pertahanan dan atau Mabes TNI untuk melakukan transformasi militer Indonesia. Debat publik tentang prosedur/mechanisme anggaran mempersoalkan 3 masalah: (1) beban keuangan negara; (2) pelanggaran peraturan perundangan yang berkaitan dengan kewajiban DPR untuk menegakkan disiplin anggaran; dan (3) proses imbal beli yang tidak transparan.

Masalah kebutuhan pertahanan dapat diatasi jika pemerintah secara rinci menjelaskan bahwa akuisisi Sukhoi merupakan bagian dari upaya jangka panjang Departemen Pertahanan dan Mabes TNI untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan Indonesia. Penjelasan ini tentunya harus didukung oleh publikasi dokumen-dokumen publik yang diamanatkan oleh UU 3/2002 seperti Kebijakan Umum Pertahanan Negara, Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pertahanan Negara, Buku Putih Pertahanan, dan Rencana Strategis (RENSTRA) Pertahanan Indonesia. Dokumen-dokumen publik ini harus dapat secara jelas menunjukkan visi strategis jangka panjang Departemen Pertahanan dan Mabes TNI yang didalamnya antara lain menjabarkan adanya peralihan atau penggabungan sistem persenjataan TNI-AU yang ada sekarang ke sistem persenjataan Rusia.

Masalah prosedur/mechanisme anggaran hanya dapat diatasi dengan suatu kompromi politik. Kompromi politik ini dapat dilakukan jika (1) pemerintah mengakui adanya kesalahan prosedural akuisisi Sukhoi dan karenanya segera melakukan tindakan-tindakan korektif untuk memperbaiki dan mencegah terulangnya kesalahan tersebut; dan (2) DPR memberikan fleksibilitas yang cukup bagi Menteri Keuangan untuk merevisi APBN sehingga beban akuisisi Sukhoi dapat sepenuhnya ditanggung oleh keuangan negara melalui mekanisme anggaran yang ada.